

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



PKS

*Bersama Melayani
Rakyat*

Presiden PKS

**Tiga Instruksi
Presiden PKS Dukung
UMKM Bangkit**



Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Fraksi PKS Kembali
Potong Gaji Untuk Bantu
Korban Bencana**



**UMKM
PENYELAMAT
EKONOMI**



UMKM

Penyelamat Ekonomi



Presiden Asyik mencoba motor listrik buatan NTB di Lombok, NTB, Sabtu, (05/12/2020). Foto : Arief Karel/PKSFoto

Pahlawan penyelamat. Itulah UMKM. Berkali-kali UMKM telah menyelamatkan Indonesia dari krisis. Kini peran penting itu kembali dijunjung oleh UMKM.

Apa rahasianya UMKM yang memang kecil itu bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis? menggerakkan ekonomi riil. Ekonomi nyata di lapisan masyarakat yang berada di lapis piramida paling bawah. Jumlahnya orangnya banyak dan didominasi kelas ekonomi paling rentan.

Ini lah ampuhnya UMKM. Praktik konglomerasi di negeri ini nyatanya tak benar-benar menolong saat negara dalam krisis. Praktik ekonomi yang kadang rumit tak mampu menguatkan pondasi saat negeri ini dihajar krisis. UMKM dengan kesederhanaan proses dan praktiknya ternyata mampu menjadi penopang kukuh.

Rasanya menjadi wajar jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan UMKM salah satu

sektor khusus yang harus dikembangkan. Bisa apa partai yang tak punya banyak daya dukung dan garis kebijakan karena di luar pemerintahan ini?

Mudah saja: bisa menggerakkan UMKM. Saat DPP PKS menggelar lomba gebyar UMKM, lebih dari 2.200 yang mendaftar dalam hitungan hari. Lagi-lagi simpel saja. Teramat banyak kader PKS yang menjadi pelaku UMKM itu sendiri. Mereka sudah terbiasa

merdeka dengan usaha kecilnya. Mau cari barang-barang kebutuhan sehari-hari, cari saja kader PKS. Semangat mandiri dan berwirausaha sebagai jalan rezeki sudah tertanam dalam diri kader.

Tapi ini tak melulu soal membela kader. Justru dengan memiliki penggerak di bidang UMKM, PKS paham bahwa sektor ini harus mendapat dukungan. Jika mereka yang dilabeli pengusaha kelas kakap mendapat tax amnesty, keringanan pajak atau sampai kredit, UMKM jelas lebih berhak mendapatkannya.

PKS ingin memastikan, UMKM bukan hanya dilirik saat krisis tetapi juga akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Caranya, dengan memberikan insentif bagi pelakunya. Detailnya bisa banyak yang dikerjakan pemangku kebijakan. Menyuarkan dan mengawalinya adalah satu

diantara tugas PKS.

Alhamdulillah, gerakan oposisi konstruktif PKS disambut objektif oleh pemerintah. Hadirnya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar nasional yang diadakan PKS jelas menunjukkan PKS dan pemerintah tak asal beda dalam semua kebijakan. Dalam kebijakan yang mendukung lahirnya ekonomi kerakyatan yang kuat, PKS akan siap mendukung. Sembari tetap melakukan kerja-kerja pengawasan.

Sinergi itu terjadi karena kerjasama dari pihak-pihak yang berbeda. Itulah hakikat demokrasi. Untuk pembangunan rakyat, PKS akan terus bergerak dengan semua sumber daya yang dimiliki. Tak soal apakah sedang di luar atau di dalam pemerintahan. Bagi PKS, UMKM adalah pahlawan yang harus disokong agar terus mau melindungi negeri ini.

UMKM

Anis Byarwati Minta Bank Sentral Ikut Dukung Akses Perbankan untuk UMKM

"Sebenarnya, banyak sekali program-program yang bisa diakses oleh UMKM. Tetapi karena keterbatasan kapasitas SDM mayoritas pelaku UMKM terutama yang ultra mikro, maka program-program tersebut sulit diakses oleh mereka,"

Anis Byarwati

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan BI kepada UMKM melalui program Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), dalam acara rapat Komisi XI DPR RI bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia, pada Senin (25/1/2021).

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga memaparkan data dari Kementerian Koperasi yang menyebutkan bahwa rata-rata UMKM di Indonesia yang jumlahnya 64 juta unit UMKM, memiliki masalah dengan kapasitas SDM nya.

"Sebenarnya, banyak sekali program-program yang bisa diakses oleh UMKM. Tetapi karena keterbatasan kapasitas SDM mayoritas pelaku UMKM terutama yang ultra mikro, maka program-program tersebut sulit diakses oleh mereka," kata Anis.

Kemudian data juga menunjukkan bahwa ketika diproses secara digital, UMKM yang masuk proses digital hingga Juni 2020 tercatat hanya 9,6 juta unit.

Menurut data yang dipaparkan Anis, masalah lain yang dihadapi UMKM terkait dengan kesulitan akses bantuan restrukturisasi kredit.

"Banyak sekali UMKM yang unbankable. Mereka tidak bisa mengakses perbankan," ujarnya. Karenanya, Anis menyarankan agar program-program bantuan restrukturisasi, juga dikurirkan melalui BPR, BPRS, BMT atau Koperasi, sehingga pengusaha ultra mikro, terutama ibu-ibu rumah tangga bisa mengakses dengan lebih mudah. "Karena banyak sekali yang membutuhkan permodalan untuk UMKM ini," kata Anis.

Doktor Ekonomi Islam ini mengungkapkan bahwa banyak literatur yang menunjukkan bahwa kunci sukses implementasi kebijakan moneter yang efektif, sangat



tergantung dari ekspektasi pelaku ekonomi. Tentang apa yang pelaku ekonomi percayai akan terjadi di masa mendatang dan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap Bank Sentral.

Dengan kata lain, kredibilitas Bank Sentral menjadi sangat penting dalam menentukan apakah Bank Sentral dapat menerapkan satu kebijakan moneter secara efektif.

"Apalagi disaat kondisi ekonomi tidak pasti seperti sekarang ini. Kredibilitas

menjadi semakin penting, karena berkaitan dengan kepercayaan pelaku pasar terhadap kemampuan Bank Sentral dalam mengendalikan kebijakan moneter," ungkapnya.

Oleh karena itu Anis menyarankan agar Bank Indonesia memiliki parameter untuk menilai persoalan kredibilitas ini, sehingga kebijakan moneter yang dilakukan betul-betul bisa meyakinkan masyarakat bahwa kondisi saat ini bisa diatasi.



LOMBA CIPTA KREASI

Kriteria Penilaian Lomba Cipta Kreasi 'Merchandise' Branding PKS

- Go Green
- Unik
- Incentitas PKS
- Marketable

JUARA #1	JUARA #2	JUARA #3
Rp 10 jt	Rp 7.5 jt	Rp 5 jt
JUARA HARAPAN 1 Rp 4.000.000	JUARA HARAPAN 2 Rp 3.500.000	JUARA HARAPAN 3 Rp 3.000.000
JUARA FAVORIT 1 Rp 2.000.000	JUARA FAVORIT 2 Rp 1.000.000	

LOMBA FOTO

Kriteria lomba foto UMKM:

- Narasi UMKM Bangkit saat Pandemi (bobot 35)
- Komen (bobot 15)
- Sisi fotografis (bobot 35)
- Like (bobot 15)

JUARA #1	JUARA #2	JUARA #3
Rp 5 jt	Rp 4 jt	Rp 3 jt
JUARA HARAPAN 1 Rp 2.500.000	JUARA HARAPAN 2 Rp 2.000.000	JUARA HARAPAN 3 Rp 1.500.000
JUARA FAVORIT 1 Rp 1.250.000	JUARA FAVORIT 2 Rp 750.000	

Teknis Lomba

1. Foto diterima oleh panitia sampai dengan maksimal tgl 10 Januari 2021, Untuk Produk dikirim stemple pos tanggal 10 Januari 2021.
2. Peserta mengisi google form
3. Produk sample dan Foto menjadi milik panitia
4. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat

Alamat Pengiriman Sampel :

Kantor BPJE DPP PKS, MD Lt 4, Jl. TB simatupang No 82, RW. B, Ps Minggu, Kec. Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520

Keuntungan Bagi Peserta

1. Menjadi Juara Lomba, dan berkesempatan produknya dapat dijadikan sebagai merchandise di Mukernas PKS 2021
2. Produk dikenal oleh masyarakat luas
3. Potensi kolaborasi dan peluang mendapatkan investasi dari pelaku usaha dan investor

INFORMASI

0812 1857 0804

Link Pendaftaran :

bit.ly/PKS-LombaUMKM

UMKM

DPP PKS Adakan Gebyar Lomba UMKM untuk Bangkitkan Ekonomi Nasional

H. Rofik Hananto, S.E.

Ketua BPJE DPP PKS

“Kegiatan ini adalah salah satu upaya PKS dalam membantu memberikan solusi dan dukungan bagi para pelaku UMKM agar tetap bertahan dan bangkit di saat pandemi seperti saat ini dengan mengambil tema utama **#PKSdukungUMKM**,”

UMKM

Tiga Instruksi Presiden PKS Dukung UMKM Bangkit

Tiga instruksi Presiden PKS agar dukungan PKS terhadap UMKM nyata dan berbuah menjadi kebijakan struktur partai hingga tingkat bawah.

Pertama pemberian bantuan langsung bagi pemberdayaan UMKM oleh pejabat publik PKS.

Kedua, bantuan modal kerja bagi UMKM yang tidak terlalu membebani baik melalui Program Dana Bergulir atau Hibah Bantuan Modal dan kerjasama usaha.

Ketiga mendorong kepada seluruh keluarga besar PKS untuk proaktif membeli hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang industri kreatif, pertanian, peternakan, kuliner, hingga industri rumah tangga.

H. Ahmad Syaikh
Presiden PKS

Disampaikan dalam Webinar dan Lomba untuk menggerakkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), Jakarta, Sabtu (16/01/2021).



UMKM

Kemandirian Ekonomi Melalui UMKM Jadi Satu Misi PKS

"Dalam konteks ini pengabdian dalam bentuk kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Semuanya, tak lain ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,"

Ahmad Syaikhul

Presiden PKS

Jakarta -- DPP PKS Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) menggelar Webinar Nasional "UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi", Sabtu (16/1/2021).

Dalam sambutannya, Presiden PKS Ahmad Syaikhul menyebut webinar nasional ini merupakan upaya PKS untuk turut serta berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, khususnya dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Ia mengatakan kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen PKS untuk menjalankan misi kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan

pembelaan terhadap kepentingan masyarakat, memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian.

"Dalam konteks ini pengabdian dalam bentuk kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Semuanya, tak lain ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," papar Syaikhul dalam paparannya.

Syaikhul menerangkan, potensi keberadaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting bagi perekonomian, menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Berdasarkan data dari

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak lebih dari 64 juta unit atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Terhadap perekonomian nasional (PDB), kontribusi mencapai sebesar 20 – 50 persen. Sehingga, potensi basis ekonomi nasional sangat kuat dengan jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerjanya pun besar mencapai 50 persen.

UMKM di masa pandemi merupakan salah satu sektor yang terdampak. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil



Presiden PKS Ahmad Syaikhul (dok PKSFoto)

Menengah (Kemenkop UKM) pada Oktober 2021 menyebutkan sebanyak 90 persen UMKM telah terganggu usahanya akibat pandemi Covid-19.

"Diantara keluhan para pelaku bisnis UMKM dimasa pandemi selain penurunan pendapatan adalah sulit juga untuk mendapatkan bahan baku, terhambatnya distribusi, kesulitan dalam pemodalannya, hingga terhambatnya produksi," sebut dia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberi dukungan terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 melalui berbagai kebijakan. Namun demikian, papar dia, realisasi masih menemui sejumlah catatan evaluasi.

Diantaranya program BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp. 2,4 juta bagi yang terdampak Covid-19 yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Masalah distribusi dan pendataan masih terjadi.

"Ada sejumlah warga yang tidak menerima bantuan padahal layak dan sudah mendaftarkan diri. Kasus lain di Sukabumi, sejumlah warga yang mendapatkan BLT UMKM mengeluh akibat adanya pungli dari oknum petugas. Serta, masih banyak pelaku usaha yang mengatakan pencairan BLT tidak bisa dicairkan lantaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat tempat tinggal salah input," sebut dia.

UMKM

Rofik Hananto: UMKM Tidak Mungkin Tumbuh Besar Tanpa Dukungan Pemerintah

"UMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi meskipun belum mendapatkan tempat yang layak di negeri ini. Mari kita manfaatkan dengan baik segala fasilitas, segala kebutuhan yang sudah diberikan oleh pemerintah, salah satunya di Kemenkopukm. Lebih dari 700 triliyun dana-dana APBN itu bisa dipakai untuk menguatkan UMKM,"

H. Rofik Hananto, S.E.

Ketua BPJE DPP PKS

Disampaikan dalam Webinar dan Lomba untuk menggerakkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), Jakarta, Sabtu (16/01/2021).



UMKM

Menteri Koperasi dan UMKM Ajak PKS Dampingi Transformasi UMKM Agar Bertahan

"Banyak pelaku UMKM yang bertransformasi dari usaha offline ke online karena penerapan PSBB. Jumlah UMKM yang terhubung marketplace online tumbuh dari 14 persen menjadi 16 persen atau lebih dari 10 juta,"

Teten Masduki

Menteri Koperasi dan UMKM

Jakarta -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang terdampak dari hulu sampai hilir.

Beberapa UMKM bisa bertahan setelah melakukan perubahan usaha dari luring ke daring. "Banyak pelaku UMKM yang bertransformasi dari usaha offline ke online karena penerapan PSBB. Jumlah UMKM yang terhubung marketplace online tumbuh dari 14 persen menjadi 16 persen atau lebih dari 10 juta," katanya dalam Webinar Nasional ke 1 bertema UMKM

Tulang Punggung Ekonomi Bangsa Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi yang digelar DPP PKS, Sabtu (16/1/2021).

Teten mengajak semua pihak termasuk PKS untuk bahu membahu mempercepat proses adaptasi UMKM agar memiliki daya tahan dan daya saing, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, baik pasar offline maupun online.

"UMKM dan Koperasi menunjukkan peran penting dalam proses pemulihan dampak pandemi. Lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi



Teten Masduki Menteri Koperasi dan UMKM (dok Pikiran Rakyat).

terhadap 14 persen ekspor non-migas dan 97 persen total penyerapan tenaga kerja. Dan 61 persen kontribusi PDB nasional," katanya.

Dia menambahkan, pelaku

usaha di Indonesia tulang punggungnya adalah UMKM. Dari waktu ke waktu UMKM terbukti menjadi pilar ekonomi nasional. Selama tahun 2020 pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan dari supply

and demand dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan di masa pandemi.

UMKM

Cerita Sukses Gubernur NTB Bangkitkan UMKM Saat Pandemi

"Untuk membina UMKM harus ada political will dari pemerintah terutama membeli produk dan menyediakan pasar. Persoalan UMKM kadang bukan tidak bisa produksi, tapi setelah produksi dengan anggaran terbatas, mau dijual kemana? UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi,"

Zulkieflimansyah

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)

MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menekankan pentingnya kebijakan dan kemauan pemerintah untuk bisa membantu UMKM. Adanya keberpihakan pemerintah dengan menyediakan pasar serta membeli barang UMKM adalah langkah nyata agar UMKM bisa bertahan di era pandemi.

"Untuk membina UMKM harus ada political will dari pemerintah terutama membeli produk dan menyediakan pasar. Persoalan UMKM kadang

bukan tidak bisa produksi, tapi setelah produksi dengan anggaran terbatas, mau dijual kemana?" papar Zulkieflimansyah dalam Webinar Nasional "UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi", Sabtu (16/1/2021).

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS ini mencontohkan saat pandemi Covid-19, Pemprov NTB memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan tenaga medis

selama pandemi dengan barang-barang produksi NTB.

Ia menceritakan, bantuan sosial yang diberikan ke masyarakat saat awal Pandemi berupa beras, gula, garam, sabun, hand sanitizer dan masker semuanya adalah produk NTB.

"Ada 5.000 UKM yang bisa terlibat. Memang secara kualitas masih tertinggal dan secara harga masih lebih tinggi. Tapi kita berikan penjelasan ke aparat hukum, BPK dan BPKP bahwa ada cost of learning disana bagi UMKM NTB," ujar



Gubernur NTB Zulkieflimansyah menaiki sepeda motor listrik buatan NTB (Arif/PKSFoto)

dia.

Terbukti, setelah produk didistribusikan melalui BUMDes dan masyarakat, ada masukan perbaikan terkait produk dari masyarakat yang menggunakan.

"Pemerintah ambil produk lalu distribusi baru ada feedback dari konsumen sehingga ada pembelajaran. Alhamdulillah sekarang 5.000 UMKM ini sudah sesuai SNI. Mudah-mudahan ke depan produk NTB bisa kompetitif di pasar nasional bahkan global,"

ujar dia.

Zulkieflimansyah kembali menegaskan keberpihakan pemerintah sangat vital terhadap kemajuan UMKM. Selain membeli produk dan menyediakan pasar, juga diperlukan strategi pembangunan industri yang terkait dengan penyediaan bahan baku bagi UMKM.

"Kalau sudah jalan, produknya laku dan uang mengalir ke UMKM maka inovasi dan pembelajaran akan datang dengan sendirinya," cetusnya.

UMKM

Peserta Tembus Angka 2000, Ari Maryadi: Stimulus Bangkitnya UMKM Indonesia

"Ini sangat luar biasa sekali, dan kami yakin insya Allah UMKM di Indonesia akan semakin bangkit dan semakin hari semakin jauh lebih baik. Karena memang luar biasa sekali hasil kreatifitas dari teman-teman UMKM yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menstimulus masyarakat Indonesia tampil dan hadir di tengah krisis ini tetap bisa eksis untuk membangkitkan semangat membangun kewirausahaan,"

Ari Maryadi

Ketua Panitia Lomba Gebyar UMKM DPP PKS



**UMKM**

Syaikhul Nilai Anggaran Desa Belum Timbulkan Efek Signifikan

Diungkapkan dalam Webinar Seri 2 dengan tajuk "Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa" yang diadakan oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS.

"Penambahan jumlah anggaran kepada desa ternyata tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Justru yang terjadi adalah angka gini ratio di desa jauh lebih menganga, lebih besar daripada di perkotaan,"

H. Ahmad Syaikhul
Presiden PKS

UMKM

Aries Mufti Bocorkan Bagaimana Cara Wujudkan Desa Emas

"Berdikari dalam arti apapun yang dikerjakan adalah swadaya dan swadarma. Jika dikerjakan maka desa itu akan menjadi desa emas,"

Aries Mufti

Pendiri Gerakan Desa Emas

Jakarta (23/1) - Pendiri Gerakan Desa Emas Aries Mufti memberikan bocoran bagaimana cara mewujudkan sebuah desa itu menjadi Desa Emas.

Desa akan, kata dia, maju jika warganya memiliki semangat pantang menyerah, tekun, bekerja cerdas-bekerja ikhlas, juga berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

"Berdikari dalam arti apapun yang dikerjakan adalah

swadaya dan swadarma. Jika dikerjakan maka desa itu akan menjadi desa emas," kata dia dalam Webinar Seri 2 dengan judul "Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa" yang diadakan oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS pada Sabtu (23/1/2021).

Selain itu, kata dia, dengan cara membina warga menjadi Patriot Desa. Patriot Desa ini lah menjalankan tugas dengan



akhlak mulia dan karakter pantang menyerah, malu jadi benalu dan bergotong royong mengelola potensi desa.

"Kemudian, yang kedua, mendidik Patriot Desa menjadi trainer pelatih warga desa agar cerdas secara spiritual, emosional, intelektual dan vokasional melalui lima pilar gerakan Desa Emas," ungkap

dia.

Yang ketiga, lanjut dia, membantu Komite Pembangunan Desa membuat Rencana Pembangunan Desa. Keempat membantu implementasi Peta Jalan Satu Desa Satu Industri dan Bela Desa Bela Bangsa.

"Terakhir, Kampus Desa Emas

(Kampus Merdeka) menjadi inkubator desa menjadi Desa Pancasila mencapai tujuan SDG's," ujar dia.

Oleh sebab itu, kata Aries, ia sangat mendukung upaya BPJE PKS yang memiliki arah yang sama. "BPJE PKS ini harus kita dukung karena memiliki semangat membangun," tukas Aries.

UMKM

Menteri Desa Minta Maaf Terkait Jawaban Korelasi Kontribusi Terhadap Penurunan Kemiskinan

"Mohon maaf Pak Presiden dan Keluarga PKS, sampai dengan hari ini, kami dari Kementerian Desa belum bisa memberikan jawaban ketika ditanya berapa persen kontribusi dana desa mulai tahun 2015 sampai 2050 terhadap penurunan kemiskinan. Bukan kemiskinan berbasis data statistik, PBS maksud saya. Bukan kemiskinan berbasis data desa,"

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)

Jakarta (23/1) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepada Presiden PKS Ahmad Syaikh karena belum bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan berapa persen kontribusi dana desa mulai tahun 2015 sampai 2050 terhadap penurunan kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkan Abdul Halim dalam Webinar Seri 2 dengan tajuk "Menciptakan Desa Sebagai

Pusat Pertumbuhan dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa" yang diadakan oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS pada Sabtu (23/1/2021).

"Mohon maaf Pak Presiden dan Keluarga PKS, sampai dengan hari ini, kami dari Kementerian Desa belum bisa memberikan jawaban ketika ditanya berapa persen kontribusi dana desa mulai tahun 2015 sampai 2050 terhadap penurunan kemiskinan. Bukan kemiskinan berbasis data statistik, PBS

maksud saya. Bukan kemiskinan berbasis data desa," kata dia

Ketidakakuratan data yang juga bukan masalah akurasi saja, kata dia, tapi sistem utilitas dalam pendataan di desa. Misalnya saat menangani kasus Jaring Pengaman Sosial, di mana data tahun 2015 dijadikan dasar penyaluran di tahun 2019 dan 2020 kemarin. Sementara dana BLT desa didasarkan data pendataan baru yang dilakukan relawan-relawan lawan



Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Webinar Seri 2 yang diadakan oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS pada Sabtu (23/1/2021).

Covid-19 dengan jumlah pendata 3 orang per RT dengan basis RT, dilakukan warga RT itu sendiri.

"Maka dihasilkan kurang lebih dihasilkan 8 juta keluarga penerima manfaat yang kami bisa mempertanggungjawabkan dan meyakini bahwa data itu jauh lebih valid dibanding yang lain karena didata sendiri oleh masyarakat desa, dilakukan verifikasi dan validasi oleh warga desa diambil keputusan melalui forum tertinggi di desa yaitu musyawarah desa," ungkap dia.

Sehingga 8 juta keluarga penerima manfaat, 88 persen penerima dana BLT desa adalah petani dan buruh tani kemudian baru yang lain

misalnya guru, nelayan dan tenaga kerja selain petani dan buruh petani.

Termasuk data di luar dugaan, lanjut dia, yang tidak dihitung tetapi muncul dari pendataan penerima BLT desa yaitu perempuan kepala keluarga (PEKA) yang jumlahnya sekitar 2,5 juta dari 8 juta data penerima manfaat.

"Dari fakta ini maka saya sangat yakin ketika dana desa kita berikan ruang yang cukup untuk melakukan perencanaan secara masif berbasis permasalahan yang ada di desa. Maka saya yakin akan bisa melakukan proses pembangunan dan tentu dana desa akan lebih terarah," ujar dia.

UMKM

Syaikhu: Proses Perencanaan Desa Kerap 'Hantam Kromo'

"Jadi sebenarnya tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD saja. Lalu di mana persoalannya? Ternyata persoalannya, proses perencanaan di desa itu 'hantam kromo' saja dari pusat 'pokoknya desa harus begini' tanpa melihat potensi-potensi yang spesifik yang ada di pedesaan tertentu. Perencanaan-perencanaan ini belum berdasarkan data desa presisi. Bagaimana masyarakat ini akan lebih berdaya dan memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi. Sayangnya kita berdasarkan kajian, terus mengandalkan APBN dan APBD. Padahal kalau kita melihat potensi-potensi yang ada di desa itu sungguh sangat besar,"

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

Diungkapkan dalam Webinar Seri 2 dengan tajuk "Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa" yang diadakan oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS.



UMKM

Rofik: Transformasi Desa Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Industri Baru

"UMKM desa sebagai motor pertumbuhan dan industri baru berbasis potensi ekonomi desa untuk UMKM naik kelas melalui industrialisasi. Karena di situ ada padat karya, padat modal dan kualitas produk,"

Rofik Hananto

Ketua BPJE DPP PKS

Jakarta (24/01) -- Ketua BPJE DPP PKS yang juga Anggota DPR RI Rofik Hananto mengatakan transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri baru. Desa di Indonesia memenuhi syarat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan terus berkembang dan sebagai destinasi yang semakin digandrungi.

"Desa itu istimewa. Desa adalah kekayaan yang sangat besar namun belum terolah. Di desa ada air bersih, udara bersih dan makanan sehat," kata Rofik.

Hal tersebut diungkapkan Rofik dalam Webinar Seri 2 dengan judul "Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa" Yang Diadakan Oleh

Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS, Sabtu (23/01).

Tahun 2015 dana desa dimulai sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan UMKM mulai berkembang tahun 2000 pasca krisis ekonomi. Dana desa diberikan ke desa dengan beberapa parameter, yakni jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan.

"Jumlah kemiskinan menjadi dasar pemberian dana desa sebesar 50 persen. Luas wilayah 20 persen dan jumlah penduduk 30 persen. Dan setelah ada UU Desa ini kemudian ada Menteri Desa dan di tahun 2020 di PKS ada Bidang Desa dan Pengembangan Desa," ujar

legislator asal Kabupaten Purbalingga itu.

Dia menjelaskan, pada kurun waktu 2015-2018 desa melakukan perencanaan. Dana desa dimanfaatkan untuk pelatihan, kegiatan fisik dan pengadaan sarana prasarana, dan beberapa trial project. Di tahun 2018-2020 desa mulai menampilkan potensi desa dan percontohan. Selain itu diadakan kegiatan pemberdayaan dan menuju destinasi wisata.

"Sedangkan di tahun 2020-2025 desa lebih fokus pada pemberdayaan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Desa juga mengarah industrialisasi potensi desa. Salah satu contoh desa yang berhasil bertansformasi adalah



Desa Rumaida di Maluku Tenggara," katanya.

Kemudian dengan desa emas maka UMKM akan berdaya. Pengembangan desa membutuhkan daya tarik. Kita mencoba melakukan bagaimana agar desa terus berdaya. Dan salah satunya adalah melalui UMKM. Desa sebagai pusat pemberdayaan. Showcase potensi UMKM desa menuju destinasi wisata.

"UMKM desa sebagai motor pertumbuhan dan industri baru berbasis potensi ekonomi desa untuk UMKM naik kelas melalui industrialisasi. Karena di situ

ada padat karya, padat modal dan kualitas produk. Hal ini pula telah dilakukan Riza dari Banjarnegara yang mengembangkan tepung mocaf dari desa menjadi sebuah industrialisasi," jelasnya.

Ini menunjukkan ketika potensi desa digali dan hasilnya bagus membutuhkan proses berikutnya yakni industrialisasi yang membutuhkan kreativitas lebih bagus lagi. Desa mempunyai potensi luar biasa. Bisa ditunjukkan melalui pariwisata hingga sampai industrialisasi. (*)

UMKM

LPEI Dapat Suntikan Rp 5 Triliun, PKS: Harus Dorong Ekspor UMKM

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia EximBank membukukan rugi bersih sebesar Rp 4,7 triliun pada 2019. Selain kerugian, LPEI juga mencatatkan penurunan aset hampir 10% menjadi Rp 108,7 triliun pada 2019,"

Anis Byarwati

Anggota Komisi XI DPR RI



Jakarta -- Pemerintah memutuskan menambahkan modal kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(LPEI) sebesar Rp 5 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal LPEI, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30

Desember 2020 lalu. Suntikan modal ini diberikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan mendorong perekonomian nasional.

"Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia EximBank membukukan rugi bersih sebesar Rp 4,7 triliun pada 2019. Selain kerugian, LPEI juga mencatatkan penurunan aset hampir 10% menjadi Rp 108,7 triliun pada 2019," tutur Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, saat diminta pandangannya di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Selain itu, Anis juga mengungkapkan bahwa terdapat 14 temuan BPK dalam laporannya yang menilai kinerja pemberian fasilitas pembiayaan di LPEI belum maksimal. Terutama pemantauan pada debitur-debitur yang berpotensi bermasalah. "Saya kira LPEI harus menindaklanjuti temuan2 BPK ini," tambah Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai, harus ada langkah strategis yang diambil LPEI ditengah semakin ketatnya likuiditas ditambah dengan

semakin besarnya defisit pendapatan Pemerintah pada tahun 2019.

Anis juga memberikan catatan untuk Non Performing Financing (NPF) dari LPEI yang termasuk tinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2019, NPF bruto LPEI sudah mencapai 23,39%, meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 13,73%. Angka tersebut sangat tinggi apabila dibandingkan dengan Bank-bank BUMN yang hanya berkisar antara 2-5%. "Tingginya NPF ini seharusnya menjadi catatan tersendiri, terutama apabila LPEI akan dilibatkan dalam program stimulus perekonomian dalam rangka menangani wabah Covid," tegasnya.

Adapun terkait dengan Langkah Pemerintah memberikan tambahan PMN untuk LPEI, Anis menyatakan LPEI dapat menjadi Lembaga strategis untuk mendorong ekspor UMKM. Dalam siaran pers nya, LPEI menyatakan baru bisa memfasilitasi sekitar 2200 UMKM hingga saat ini. "Angka tersebut masih relatif sangat rendah dengan besarnya potensi yang ada," tutup Anis.

**Peristiwa**

Insiden Sriwijaya Air SJ-182, PKS: Harus Jadi Evaluasi Seluruh Maskapai

"(Kejadian ini harus menjadi dasar evaluasi bagi seluruh maskapai penerbangan) Hal ini agar proses investigasi terhadap penyebab jatuhnya pesawat dapat segera dilakukan dan rekomendasi perbaikan dari KNKT dapat segera diberikan untuk menghindari kecelakaan lainnya,"

H. Ahmad Syaikhu

Presiden PKS

Bencana Alam

Berikan Bantuan Sembako dan Uang Tunai, PKS Minta Semua Pihak Bersatu Bantu Warga Terdampak Bencana

"Kita semua harus bersatu, bahu membahu, bergotong royong untuk bersama-sama melayani masyarakat korban terdampak cuaca ekstrem di Kepri saat ini,"

Bahktiar M. Rum, Lc., MA.

Ketua DPW PKS Kepri

Batam - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Kepri dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Batam menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk korban terdampak cuaca ekstrem di kelurahan Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Ahad (03/01/2021).

Bantuan ini diserahkan langsung Ketua DPW PKS Kepri Bahktiar M. Rum, Lc., MA. didampingi Ketua DPD PKS Kota Batam Yusuf, S.Mn., MM. dan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batam Rohaizat.

"PKS di Kepri melakukan aksi peduli korban terdampak

cuaca ekstrem banjir, longsor, dan puting beliung; kita mengajak semua pihak bersatu padu menangani persoalan ini.

Saat ini relawan kita sedang turun ke lapangan membantu apa yang dapat dibantu dan ini gerakan aksi sosial menyeluruh se-Kepri utamanya di Tanjungpinang dan Batam," kata Bahktiar.

Dia menambahkan, bantuan berupa sembako dan uang tunai ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh korban terdampak dalam jangka pendek.

"Dalam jangka panjang tentu semua pihak harus



berkoordinasi terkait recovery-nya, saat ini kita harus bergerak untuk memenuhi kebutuhan primer atau pokok warga terdampak tanpa memperhatikan latar belakang korban dari sudut pandang apapun; agama, suku, bahkan pilihan politik," tambah Bahktiar.

Dilanjutkannya, semua pihak harus bersatu untuk menangani bencana kemanusiaan ini. "Kita semua harus bersatu,

bahu membahu, bergotong royong untuk bersama-sama melayani masyarakat korban terdampak cuaca ekstrem di Kepri saat ini," tutup Bahktiar.

Di Tanjung Uma, rumah-rumah warga di sekitar pesisir mengalami kerusakan diakibatkan hantaman tongkang Singapura yang hanyut terbawa gelombang pasang di laut.

Salah seorang warga yang enggan namanya disebutkan

mengucapkan terima kasih banyak kepada PKS yang sudah bergerak cepat membantu korban terdampak.

"Kita ucapkan terima kasih kepada PKS yang sudah membantu korban terdampak, semoga kita semua lulus dari ujian bencana awal tahun ini," kata salah seorang warga Tanjung Uma yang rumahnya ditabrak tongkang Singapura.

Bencana Alam

Banjir dan Longsor Sumedang, Dapur Umum PKS Bagikan 1.510 Nasi Bungkus



Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang membuat dapur umum di dekat lokasi kejadian longsor Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Minggu (10/1). Pada hari pertama, dapur umum PKS Sumedang sudah menyalurkan 1.510 nasi bungkus.

Sumedang -- Dari 50 relawan yang diterjunkan ke lokasi longsor, 20 di antaranya adalah para kader dan simpatis perempuan PKS yang bertugas untuk membuat dapur umum guna memenuhi kebutuhan logistik di sekitar lokasi kejadian.

Tidak hanya di lokasi longsor, 30 relawan PKS lainnya juga menyisir pemukiman warga yang terkena dampak banjir dengan memberikan makanan dan air mineral.

"Kita kerahkan 20 relawan PKS untuk fokus di dapur umum, oleh ibu-ibu, 30 relawan lagi untuk membantu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan saat di lokasi," kata Dadang Sopian Syauri, Sekretaris Umum DPD PKS Sumedang yang turut terjun ke lokasi kejadian.

Ia juga menyebutkan, 30 relawan PKS tidak hanya fokus di lokasi longsor, akan tetapi di sebar ke pemukiman warga yang terdampak banjir di Cimanggung untuk membagi-bagi makanan dan minuman gratis.

"Ketika di lokasi, memang kebutuhan warga yang terdampak longsor dan banjir adalah sarana air bersih,

terutama untuk minum," kata pria yang juga menjadi Ketua F-PKS Sumedang ini.

Kordinator Relawan Bencana PKS Sumedang Aan Juhana menambahkan Partai Keadilan Sejahtera bersinergi dan berkolaborasi dengan elemen masyarakat lainnya untuk turun membantu penanganan pasca bencana yang terjadi di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor.

"Alhamdulillah hari ini, Relawan PKS sudah kami turunkan pada beberapa lokasi terdampak di wilayah Jatinangor dan Cimanggung," kata Aan.

Menurutnya, PKS juga sudah dan sedang menggalang donasi dari internal kader sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial partai di masyarakat.

"InsyaAllah donasi nantinya akan kami salurkan secara bertahap dalam bentuk bantuan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Bencana Alam

Antisipasi Bencana Awal Tahun, PKS Minta Mitigasi Sampai Level Bawah

"Mitigasi bencana di negeri ini menjadi wajib. Menjadi lebih wajib karena kita masih berada di tengah pandemi. Selain La Nina yang berpotensi mengakibatkan banjir tanah longsor, beberapa gunung berapi kita juga erupsi. Mitigasi lengkap dengan keadaan pandemi mutlak dibutuhkan,"

Yoyok Switohandoyo

Ketua DPP PKS Bidang Kepanduan

Jakarta -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerangkan musim hujan tahun 2020/2021 diwarnai oleh fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020. La Nina diprediksi akan berlangsung hingga Mei 2021 dengan intensitas La Nina Moderat menjadi La Nina Lemah pada Maret 2021.

Kondisi ini menyebabkan adanya ancaman bencana seperti genangan, banjir, longsor, dan banjir bandang pada awal tahun 2021. Terbaru terjadi banjir dan longsor di wilayah Sumedang, Jawa Barat.

Ketua DPP PKS Bidang Kepanduan Yoyok Switohandoyo menyebutkan, tim Relawan PKS senantiasa bersiaga untuk mengantisipasi dampak bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Yoyok meminta, data-data dari BMKG dan BNPB digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna melakukan kebijakan antisipasi terjadinya bencana.

"Mitigasi bencana di negeri ini menjadi wajib. Menjadi lebih wajib karena kita masih berada di tengah pandemi. Selain La Nina yang berpotensi

mengakibatkan banjir tanah longsor, beberapa gunung berapi kita juga erupsi. Mitigasi lengkap dengan keadaan pandemi mutlak dibutuhkan," papar Yoyok dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Yoyok menambahkan, menurut data BMKG, beberapa daerah yang berpotensi mengalami curah hujan kategori tinggi pada Januari hingga April 2021 meliputi bagian barat Sumatra, sebagian besar Jawa, sebagian Bali, NTT, NTB, bagian tengah-utara Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua



Barat, dan Papua.

"Daerah yang masih akan terdampak La Nina adalah daerah utama tempat tinggal penduduk. Jadi pemerintah bisa memanfaatkan Satgas Covid-19 yang sampai level RT juga mendapatkan sosialisasi tentang persiapan menghadapi bencana alam," tutur dia.

Yoyok menyebut, pemerintah perlu melibatkan semua pihak

dalam edukasi kewaspadaan bencana. Hal ini sudah berlangsung di tingkat lapangan dengan adanya koordinasi relawan di bawah komando pemerintah dengan relawan dari unsur masyarakat termasuk kepanduan PKS.

"InsyaAllah Relawan PKS di setiap daerah siap mendukung dalam upaya edukasi, mitigasi, penyelamatan, pemberian bantuan sampai rehabilitasi,"

Bencana Alam

Aksi Maraton Relawan PKS Jember Bantu Korban Banjir di Lima Kecamatan



Jember - Musibah banjir yang masih melanda lima kecamatan di Jember, kembali menjadi fokus kepedulian DPD PKS Jember. Di samping turut mengevakuasi sekitar 3.000-an warga terdampak, PKS Jember juga turut menyalurkan bantuan, membersihkan rumah dan gotong royong membantu korban banjir, termasuk mendirikan dapur umum, hingga malam hari.

Sebagaimana diutarakan Ketua

DPD Jember, Sudiyanto Joyotaruno, kepedulian ini melibatkan seluruh jajaran partai, mulai dari jajaran Anggota DPRD, kepanduan bahkan struktur DPC.

"Sebagai bentuk respons dan kepedulian kita, kader dan relawan PKS Jember kita intruksikan untuk terjun dan langsung membantu korban banjir. Semua kita kerahkan untuk menolong saudara kita yang tertimpa musibah. Ini kita

lakukan secara maraton," tambah Sudiyanto.

Secara detil, kepedulian PKS Jember dalam bentuk bersih-bersih lingkungan dan rumah warga terdampak, bantuan sembako dan baju layak pakai dan dana bantuan, di samping mendirikan posko siaga dan dapur umum, termasuk penyiapan sholat Jum'at.

Sebagaimana diketahui,

kemarin banjir sedikitnya menerjang 5 kecamatan di Jember yakni Kecamatan Bangsalsari, Tanggul, Gumukmas, Puger, dan Tempurejo. Aksi maraton PKS Jember di beberapa kecamatan mulai Bangsalsari, Gumukmas, Puger, dan Tempurejo.

Banjir kali ini disebabkan intensitas air hujan yang cukup tinggi dalam 3 hari terakhir, apalagi Sungai Bedadung yang merupakan sungai utama dengan beberapa anak sungainya tidak mampu menampungnya. Ketinggian banjir bervariasi, antara 30 cm hingga 1 meter. Banjir musiman kali ini bisa dibilang yang terparah disbanding sebelumnya.

Di kecamatan Tempurejo, yang terparah terdampak, banjir hingga ketinggian 1 meter akibat luapan sungai Kalisanen. Ada 3 desa yang terdampak, yakni Desa Andongrejo, Desa Wonoasri, dan Desa Curahngongo.

Ketua DPC Tempurejo, Jupriyanto mengatakan, "Relawan dan struktur DPC kita gerakkan untuk tetap siaga. Bahkan kita bergerak menyisir

area terdampak untuk menyalurkan bantuan hingga malam. Hari ini kita akan terjun lagi bersama DPD dan Aleg PKS untuk mendirikan posko siaga sekaligus dapur umum di lokasi terdampak." Sementara banjir di Bangsalsari menyebabkan debit air sungai Tugusari meningkat drastis, bahkan membawa material lumpur dan kayu. Yang terparah melanda Dusun Krajan.

Secara umum, banjir Jember ini menimpa kurang lebih 3.000-an KK di 5 kecamatan terdampak. Di Kecamatan Bangsalsari ada 68 KK/337 jiwa terdampak dan tiga pondok pesantren. Di Kecamatan Tanggul, yakni Desa Tanggul Kulon dan Manggisari yang berdampak terhadap 86 KK. Di Kecamatan Gumukmas yang terdampak 229 KK, di Puger 1.283 KK dan 1 ponpes, 2.320 KK terdampak di Tempurejo.

Kerugian material, ratusan rumah dan fasilitas umum terendam, beberapa di antaranya rusak ringan, termasuk beberapa pondok pesantren.

Bencana Alam

Fraksi PKS Kembali Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana

"Bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian dan keprihatinan mendalam Fraksi PKS DPR RI. Untuk itu sebagaimana yang telah berulang kali kami lakukan, Fraksi PKS kembali melakukan aksi peduli korban bencana dengan memotong gaji sebagai wakil rakyat. Semoga Allah ringankan ujian dan segera angkat berbagai musibah dan bencana dari negeri Indonesia yang kita cintai bersama, amiin ya Robbal aalamiin,"

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Bencana Alam

Pedagang Pasar Central Sorong Amanahkan Bantuan Gempa Sulbar ke PKS



Sorong -- Pedagang dan pembeli di Pasar Sentral Kota Sorong, Papua Barat menitipkan amanah donasi untuk korban gempa Sulawesi Barat melalui PKS Kota Sorong, Ahad (17/1/2021).

Anggota DPRD Kota Sorong dari PKS La Ode Samsir mengaku terharu dengan antusiasme dan kepedulian yang besar terlihat dari kesertaan berdonasi para pedagang dan pembeli yang

ada di Pasar Central.

"Saya terharu, kepedulian para pedagang dan pembeli di Pasar Cetral untuk meringankan beban korban bencana gempa di Sulawesi Barat," ungkap La

Ode Samsir.

Samsir menyampaikan bahwa ikon Kota Bersama menjadi potret nyata kehidupan warga di Kota Sorong.

"Benarlah kalau Kota Sorong disebut sebagai Kota Bersama. Masyarakat yang berdonasi tidak hanya perantau yang berasal dari Sulawesi saja. Ada orang Jawa, orang Padang, bahkan tidak sedikit mace dan pace Papua yang menyisihkan rezeki yang mereka miliki," terang Samsir.

Ia menuturkan bahwa beberapa warga merasa sungkan untuk berdonasi, mengingat lapak mereka baru dibuka. Selain itu kejadian haru pun ia temui saat tiba-tiba suara teriakan dari salah satu kedai yang baru saja ia singgahi

"Banyak yang merasa sungkan karena belum ada pendapatan, masih pagi. Tapi alhamdulillah, sebarangpun yang diberikan akan jadi bantuan berharga bagi korban bencana. Ada lagi,

Saya kaget, ada mama yang berteriak. Saya datang ulang, maaf mama panggil saya? Sudah takut ini (sambal tertawa), ternyata beliau ingin menyumbang. Terima kasih Mama!" kisahnyasambal tersenyum.

Tidak hanya pedagang, hampir semua elemen yang ada di Pasar Central memberikan bantuan.

"Semuanya! Pedagang, pembeli, tukang parkir, ojek, bahkan buruh angkut semua turut merasakan duka di Mamuju dan Majene," tambah Samsir.

Ia pun berharap bahwa selanjutnya akan semakin banyak yang bergerak melakukan aksi serupa. PKS Kota Sorong sendiri seperti jargon Pelayan Rakyat, akan terus berusaha membantu meringankan duka para korban bencana di manapun.

Bencana Alam

Terjun Ke Kalimantan Selatan, Netty Aher Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat

Banjarmasin - Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS Netty Prasetyani Aher bersama Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS H. Ahmad Heryawan, didampingi Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan H. Alifuddin, melakukan kunjungan lapangan ke Kalimantan Selatan yang sudah beberapa hari dikepung banjir di 9 kota kabupaten.

"Bertubi-tubi Indonesia diuji dengan bencana alam, seperti banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat, longsor di Sumedang, letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, gelombang tinggi disertai banjir rob di Manado, serta bencana lainnya di berbagai daerah. Ribuan warga mengungsi, korban meninggal dunia, serta tidak sedikit kerugian moril dan materil yang harus diderita masyarakat," ungkap Netty, dalam rilis tertulisnya, Senin (18/1).

Menurut Netty, ia bersama jajaran PKS turun langsung ke

lokasi bencana berdasarkan instruksi Presiden PKS pada seluruh kader, baik di pusat mau pun di daerah, untuk bahu-membahu membuat posko pelayanan dan program bantuan guna meringankan beban masyarakat.

"Presiden PKS meminta kami untuk membantu masyarakat dan bersinergi dengan berbagai elemen pemerintah setempat serta lembaga lain dalam proses mitigasi bencana," katanya.

Netty dan rombongan melakukan koordinasi tanggap bencana dengan jajaran pengurus DPW PKS Kalimantan Selatan. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari DPP PKS yang diterima oleh Mushaffa Zakir, Sekretaris DPW PKS Kalimantan Selatan. Bantuan terdiri dari kebutuhan sembako, perlengkapan maternitas, pembalut dan sejenisnya, serta makanan.

"Kejadian ini menjadi momentum bagi kita untuk menunjukkan solusi

penanganan bencana yang inovatif ala PKS, termasuk diferensiasi aksi, misalnya, dengan membuat posko ramah perempuan dan anak. Dalam setiap peristiwa bencana, perempuan dan anak-anak sering menjadi kelompok rentan yang kebutuhannya kurang diperhatikan. Kejadian ini juga menjadi pengingat kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya merawat dan menjaga lingkungan hidup," ungkap Netty.

"Masyarakat harus tetap waspada dan menjaga prokes, apalagi jika harus tinggal di pengungsian. Pemerintah daerah harus sigap dan antisipatif dalam penanganan darurat bencana agar tidak muncul klaster pengungsian. Ini kerja ekstra keras yang harus dilakukan secara gotong royong. Relawan PKS siap membantu," ujarnya.

Selanjutnya, dengan menggunakan kapal klotok, rombongan menyusuri sungai Martapura dan menyalurkan bantuan berupa makanan,



tabung gas dan air bersih kepada masyarakat di posko pengungsian Desa Pambantan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Bahkan dalam perjalanan pun Netty dan rombongan langsung memberikan nasi bungkus dan air minum pada warga yang ada di perahu-perahu karena rumah mereka terendam banjir.

"Pemerintah harus segera memastikan ketersediaan makanan, pakaian, air bersih, dan MCK yang dibutuhkan masyarakat. Kita tidak ingin keterlambatan suplai makanan dan air bersih mempengaruhi kesehatan masyarakat di masa

pandemi ini," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Menurut Netty, Indonesia dikenal dunia sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tinggi. Oleh karena itu, katanya, "Salah satu hikmah di balik musibah adalah munculnya panggilan kerelawanan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan modal sosial bangsa Indonesia. Kita tidak akan kehabisan orang-orang baik dan peduli. Oleh karena itu, sebagai partai pelayan rakyat, kader dan simpatisan PKS harus menjadi garda terdepan dalam berbuat baik dan peduli pada masyarakat," tutupnya.

Bencana Alam

Bantuan Kader dan Simpatisan PKS Kalimantan Timur (Kaltim) Tiba di Kalimantan Selatan (Kalsel)



Rombongan relawan Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur (PKS Kaltim), tiba di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan

Selatan. Membawa bantuan untuk korban banjir, yang terjadi di beberapa daerah di Kalsel. Termasuk Kabupaten

Hulu Sungai Tengah.

Rombongan disambut antusias oleh Ketua DPD PKS Hulu

Sungai Tengah dan warga yang berkumpul di posko penanggulangan bencana.

"Kami sangat berterima kasih kepada PKS Kaltim atas bantuan yang diberikan. Sudah lima posko dibuka dan kami terus mendistribusikan bantuan langsung kepada korban bencana banjir," ungkap Haslian Syahrini, Ketua DPD PKS Hulu Sungai Tengah.

Terhitung sudah lima hari warga terdampak banjir besar. Sebagian besar rumah warga tenggelam, dengan ketinggian hingga leher orang dewasa. Warga mengalami banyak kerugian akibat banjir yang datang secara tiba-tiba tersebut.

"Tidak terhitung kerugian yang diderita oleh warga," lanjut laki-laki kelahiran Kalimantan Selatan tersebut.

Haslian sangat gembira dengan kehadiran rombongan PKS Kaltim yang membawa banyak

bantuan sesuai kebutuhan mereka saat ini, "Meskipun air mulai surut dan warga mulai kembali ke rumah masing-masing, tapi mereka saat ini disibukkan dengan pekerjaan membersihkan rumah yang tertutup lumpur sisa banjir, dan alhamdulillah teman-teman PKS Kaltim membawa bantuan sesuai dengan kebutuhan warga saat ini seperti sembako, selimut, popok bayi, dan obat-obatan," ungkap Haslian.

Khairul Alim yang memimpin rombongan relawan, menyerahkan langsung bantuan yang dihimpun dari kader dan simpatisan PKS Kaltim kepada Ketua PKS Hulu Sungai Tengah, "Kami sampaikan amanah bantuan ini kepada teman-teman PKS Hulu Sungai Tengah, untuk didistribusikan kepada korban. Semoga bantuan ini bisa membantu mengurangi beban penderitaan korban banjir," ungkap Bendahara PKS Kaltim tersebut.

Bencana Alam

Bantuan PKS Kaltim untuk Korban Banjir Kalsel Tembus Hingga ke Daerah Terisolir



Hulu Sungai Tengah (18/01) -- Relawan PKS Kaltim menembus dua daerah terisolir terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Kedua daerah tersebut berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Daerah pertama terletak di area

pegunungan dan yang satu lagi berada di pinggiran sungai.

Titik lokasi hanya bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan double gardan. Beruntung tim relawan PKS Kaltim memilih kendaraan

yang tepat, sehingga bisa langsung mendistribusikan bantuan kepada warga yang terisolir.

Berdasarkan penuturan salah seorang warga yang menjadi korban banjir, mereka merasa

sangat menderita akibat musibah ini, "Akibat bencana banjir ini kami sangat menderita. Tak hanya kekurangan makan dan minum, pakaian pun hanya seadanya. Ketinggian air di tempat kami setinggi leher orang dewasa, bahkan motor yang baru lima hari yang lalu kami beli tidak sempat diselamatkan," ungkap Hamsi, warga Desa Matang Dinalon, Kecamatan Pendawan.

Sesaat setelah menyerahkan bantuan ke kantor DPD PKS Hulu Sungai Tengah, aksi kemanusiaan PKS Kaltim dilanjutkan dengan mendistribusikan bantuan ke kedua daerah terisolir tersebut. Hal ini dilakukan karena tim relawan membawa kendaraan double gardan yang memungkinkan menembus hingga ke titik lokasi yang terisolasi.

"Setelah menyerahkan bantuan ke posko utama PKS Hulu Sungai Tengah, kami melanjutkan aksi kemanusiaan mendistribusikan bantuan ke lokasi yang masih terisolir. Dua tempat yang kami tembus yaitu Desa Hinas Kanan yang dipimpin oleh Faturrahman Ketua DPD PKS Paser dan Desa

Matang Dialon bersama saya sendiri," terang Khairul Alim, Bendahara PKS Kaltim.

Relawan PKS Kaltim menjadikan kedua tempat tersebut sebagai tempat pendistribusian bantuan berdasarkan permintaan perwakilan warga.

"Warga melihat kami membawa kendaraan double gardan yang bisa menembus ke lokasi yang dituju. Maka kita sepakati untuk membawa bantuan ke dua titik lokasi tersebut. Sehingga kami bisa membantu mengurangi penderitaan korban banjir," jelas pria yang akrab disapa Ustadz Alim.

Mendapatkan bantuan dari PKS Kaltim, warga sangat berterima kasih. Terlebih bantuan yang dibawa oleh relawan PKS Kaltim sesuai dengan yang saat ini mereka perlukan, "Kami sangat berterima kasih karena mendapatkan bantuan dari bapak-bapak PKS Kaltim yang sudah datang jauh-jauh dari Samarinda. Hanya Allah SWT yang membalas kebaikan PKS, kami hanya bisa mendoakan semoga PKS bisa selalu jaya," ungkap Hamsi.

Bencana Alam

Dapur Umum PKS Sulut Sajikan Menu Sate Ayam untuk Korban Banjir



"Diharapkan menu spesial ini mengurangi sedikit duka dari masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor Manado,"

Aminah Laendre

Ketua BPKK (Bidang Pembinaan dan Ketahanan Keluarga) DPW Sulut

Manado (24/1) -- Hari Ahad kemarin Dapur Umum PKS Sulut menyiapkan sajian spesial berupa sate ayam untuk makan malam para korban banjir dan longsor yang terjadi di Manado beberapa waktu lalu.

Nampak aktivitas mempersiapkan sate sebelum dibakar, aktivitas ini dipimpin kepala dapur umum yang sekaligus Ketua BPKK (Bidang Pembinaan dan Ketahanan Keluarga) DPW Sulut, Aminah

Laendre.

"Diharapkan menu spesial ini mengurangi sedikit duka dari masyarakat yang menjadi korban banjir dan tanah longsor Manado," ungkap

Aminah.

Hingga hari ini (25/1) PKS Sulut telah menyalurkan nasi bungkus kepada korban banjir pertama dan kedua sebanyak 15 ribu bungkus di hampir semua titik banjir dan tanah longsor di Manado.

"Kami berupaya semaksimal mungkin walaupun tak mudah masuk ke semua titik tersebut, sehingga lebih dari 15 ribu nasi bungkus telah kami sebarkan dari olahan beberapa posko Dapur Umum PKS dan juga dari donatur dan mitra yang dititipkan lewat Tim Kepanduan PKS," terang Iswan.

Penyaluran secara langsung ditugaskan kepada Aleg PKS yang dipimpin H. Amir Liputo bersama Sekrteraris MPW Farist Suharyo, Ketua DPD Hasan Syafi'i, Aleg Manado dr. Suyanto Yusuf, Nur Amalia dan semua struktur dari level DPD, DPC bahkan beberapa DPRa.

PKS dari tingkat pusat hingga ranting berkomitmen hadir

menemani rakyat dalam menghadapi musibah di negeri ini dan akan terus berupaya membantu melayani kebutuhan mereka. Paket sembako juga telah disebarakan sejak Sabtu kemarin dan masih berlangsung oleh aleg-aleg PKS. Semua elemen PKS di Manado telah berupaya maksimal, tetapi karena korban yang sangat banyak maka tidak dapat terjangkau secara keseluruhan.

Amir Liputo mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh tim relawan di tingkat cabang dan ranting yang tak jemu bekerja, para mitra donatur yang menitipkan pada kami semua kebaikan melalui PKS Manado.

"Terimakasih atas kerja-kerja relawan di tingkat cabang dan ranting. Serta seluruh mitra donatur yang menitipkan kebbaikannya melalui PKS. Serta tim Kepanduan yang all out hingga ke semua titik bencana tanpa lelah," ucap Amir.

Covid-19

Surahman Ingatkan Presiden Jadi Penanggungjawab Penanganan Covid-19

"Presiden harus mensupervisi kepala daerah agar kebijakan di daerah memiliki irama dan efektivitas yang sama sehingga Indonesia bisa segera keluar dari pandemi covid 19. Kita tidak tahu batas maksimal masyarakat bisa bertahan, karena covid 19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Ini kerja bersama, tidak bisa mengandalkan kepala daerah saja untuk mengendalikan penyebaran covid 19 dan menangani pasien positif covid 19. Kita butuhkan supervisi Presiden, dan komitmen Kepala Daerah seirama dengan kebijakan yang telah ditetapkan Presiden,"

Dr. KH Surahman Hidayat, M.A.

Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PKS

Covid-19

Covid-19 Tembus 1 Juta, PKS : Harus Perbaiki Kebijakan Terpadu Berbasis Kesehatan

Jakarta -- Kasus Covid-19 di Indonesia akhirnya menembus angka 1 juta memasuki bulan ke-11 sejak kasus pertama diumumkan. Berdasarkan data yang dirilis Pemerintah per 26 Januari 2021, dengan penambahan 13.094 kasus harian baru, maka total yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 1.012.350 kasus dengan masih 16.3526 kasus aktif dan 28.468 yang meninggal dunia. Indonesia juga menjadi negara pertama di ASEAN yang tembus 1 juta kasus covid-19.

Menanggapi jumlah kasus Covid-19 ini, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyatakan saatnya pemerintah harus lebih konsisten dengan kebijakan yang diambil dalam penanggulangan Covid-19 ini.

Jika diawal penyebaran Covid-19 Pemerintah terlihat gamang dan tidak konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, maka saat ini hal itu tidak boleh lagi terjadi.

"Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diterapkan secara konsisten. Jangan justru ditengah kebijakan PPKM ini, pemerintah justru membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banya justru masuk ke Indonesia seperti yang terjadi belum lama ini," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/1/2021). Mufida menyoroti masih longgarnya pembatasan dalam kebijakan PPKM ini. Bahkan mobilitas penduduk masih belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten. Perkantoran ditetapkan 75% WFH namun operasional transportasi publik masih sampai malam dan tidak seketat pada saat awal pandemi.

"Pengawasan atas pelaksanaan PPKM juga masih lemah dan kurang didukung penegakan aturan, sehingga meskipun diberlakukan PPKM, namun kondisi di masyarakat maupun di tempat kerja seperti tidak banyak perubahan. Akibatnya

klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 dari sebelumnya jam 19.00," papar dia.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan. Di Jakarta misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44%. Di Jawa Barat, peningkatan klaster keluarga menyebabkan meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.

Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus. Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat meningkatnya klaster keluarga di bulan ini diantaranya



dampak dari libur natal dan tahun baru lalu dimana banyak keluarga berpisah.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini juga mengingatkan bukan saatnya lagi saling menyalahkan antar instansi pemerintah terkait lonjakan kasus dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 ini. Dia mencontohkan Menteri Kesehatan yang secara terbuka di media menyalahkan data Kementerian yang dipimpinnya yang tidak bisa digunakan untuk program vaksinasi.

"Sebaiknya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan secara internal dan tidak menyalahkan terbuka

yang bisa menjatuhkan pekerja di Kementerian Kesehatan. Demikian pula dengan metode penentuan testing yang dianggap salah pada metode tersebut sudah sesuai dengan kaidah Test-Tracing-Treatment plus menjangkau orang yang OTG agar tidak menularkan yang lain," terang Mufida.

"Pandemi sudah hampir setahun berlangsung dan angka resmi yang terpapar sudah tembus satu juta. Saatnya lebih fokus pada kebijakan yang terukur, konsisten dan memastikan semua kebutuhan untuk penanggulangan pandemi ini tersedia," imbuhnya.

Covid-19

Angka Covid-19 Tembus 1 Juta, Netty Singgung Klaim Pemerintah Soal Penanganan Pandemi yang Terkendali

"Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan. Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, prokes 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkabut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik,"

Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta- Kasus Covid-19 di Indonesia hingga Selasa (26/1/2021) sudah mencapai angka 1.012.350 kasus. Angka ini lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berjumlah 917.279 kasus.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher menyinggung penanganan pandemi yang masih berantakan dari hulu ke hilir.

"Dari hulu ke hilir penanganan Covid-19 oleh pemerintah masih berantakan. Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang

rendah dan belum merata, prokes 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkabut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik," kata Netty dalam keterangan media, Rabu, 27/1.

Netty juga menyebut adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi triliunan rupiah, yang seolah jadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kalau pemerintah menyebut telah mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik, menurut saya, ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya. Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara," tambah Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini

"Angka positivity rate positif Covid-19 Indonesia mencapai persentase 33,24%, yang artinya lebih dari enam kali



lipat dari angka 5 persen ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)," kata Netty.

"Dari sisi ekonomi, kita sudah masuk jurang resesi pada kuartal III-2020. Realisasi laju perekonomian minus 3,49 persen, dimana sebelumnya sempat terperosok ke angka 5,32 persen. Jadi, tolong dijelaskan, atas dalih apa jika pemerintah klaim telah terjadi keberhasilan pemulihan ekonomi?" tanya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Terakhir Netty mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini

adalah masalah serius yang penerapan kebijakannya harus tegas, konsisten dan tidak tebang pilih.

"Masuknya WN China di tengah kebijakan penutupan akses oleh pemerintah hingga 8 Februari tentu membuat kita kaget dan tidak habis pikir. Apa pun alasan pengecualiannya, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik. Rakyat jadi bingung dan bertanya-tanya: semetara mobilitas dan aktivitas mereka dibatasi, mengapa orang luar yang berpotensi membawa virus varian baru malah dibiarkan masuk," katanya.

Covid-19

Tembus 1 Juta Kasus, Sukamta: Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi

Jakarta (27/01) — Kasus Covid-19 di Indonesia tembus satu juta kasus pada Selasa (26/1), dan hari ini (27/1) disebutkan 387 orang meninggal yang merupakan rekor baru jumlah kematian sementara jumlah angka kesembuhan juga cetak rekor sejumlah 10.974 pasien.

Menanggapi hal ini, Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

“Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5%. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis.

Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisiplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan. Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlihat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

“Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes. Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin

masyarakatnya sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah,” papar Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berpendapat akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi. Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus



Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

“Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statemen Menkes, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi,” urainya.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang

menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat COVID-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.

“Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi,” tegas Sukamta mengakhiri.



PKS Bersama Anak-anak Muda Bukan Hanya Jago Kritik Tapi Juga Solutif

“Pemuda dari bangsa lain boleh hanya memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita adalah bagian dari Indonesia. Bukan tugas kita sekadar memberikan kritik. Tapi tugas luhur kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. PKS ingin hadir lewat program Wujudkan Idemu Bersama (WIB) untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. PKS ingin agar lahir sosok pemuda yang berkarakter,”

H. Ahmad Syaikhulillah
Presiden PKS

*Disampaikan dalam Acara Grand Launching Wujudkan Idemu Bersama PKS Muda,
Jakarta, Selasa (12/01/2021).*

PKS: Pak Jokowi, Selama Ini Subsidi Pupuk ke Pabrik bukan ke Petani

"Subsidi yang 330 T itu bukan langsung ke petani, tetapi ke pabrik pupuk yang notabene mereka BUMN yang harus berpikir bisnis. Itulah kenapa subsidi terus ke pabrik pupuk tapi faktanya harga sekarang naik dan barang di lapangan langka, petani jadi korbannya"

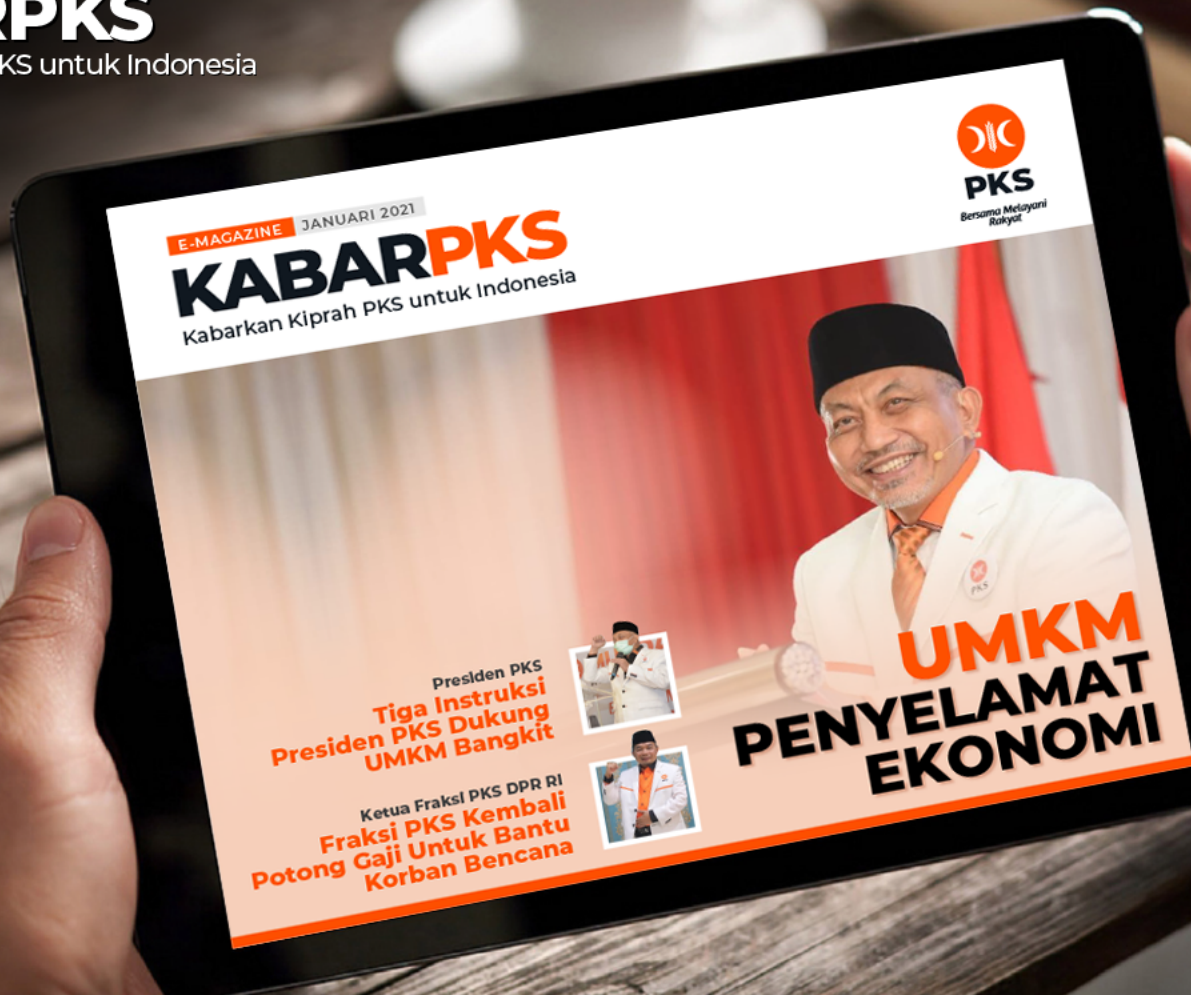
Riyono, S.Kel

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan



Nantikan terus E-Magazine KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia



E-MAGAZINE

KABARPKS

Kabarkan Kiprah PKS untuk Indonesia

KABARPKS | Diterbitkan oleh Bidang Humas dan PPID DPP PKS

Penanggung Jawab: Ahmad Maburi (Ketua DPP PKS Bidang Humas)

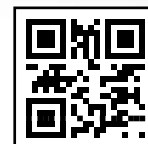
Pemimpin Redaksi: Hafidz Muftisany | Redaktur Pelaksana: Erwyn Kurniawan

Redaksi: Solich Mubarak, Hanifah Ihram | Fotografer: Muhammad Hilal, Donny, Juliyanto, Daru, Alris (PKS Foto)

Desain & Layout: Arie Poernama, Toni Suharyanto, Azam Muhammad (PKS Art)

Alamat Redaksi: MD Building | Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.

Phone +62 21 7884 2116, Fax +62 21 7884 6456, E-Mail humas@pks.id



Download e-Newsletter
KABARPKS di pks.id